

SINOPSIS

Pertautan Muhammadiyah dengan politik selalu menjadi tema yang menarik dan aktual untuk dikupas. Sebab bagi Muhammadiyah, politik bukanlah sekedar persoalan kekuasaan semata. Politik dipandang sebagai sub sistem dakwah dalam rangka pengembangan hidup sosial, sehingga Muhammadiyah senantiasa mengupayakan keselarasan antara politik dengan tujuan dakwah yang mengagungkan nilai-nilai dan etika Islam.

Dengan menyimak perubahan yang tengah berlangsung, Muhammadiyah selalu mengembangkan corak laku yang penuh dengan kehati-hatian. Sejarah telah menguji kemampuan Muhammadiyah dalam menjawab tantangan dan meraih peluang dari perubahan politik yang terjadi sehingga Muhammadiyah tidak pernah gagap menghadapi arus perubahan ini.

Penelitian deskriptif analitis yang penulis lakukan menunjukkan bahwa Muhammadiyah tetap mampu berperan sebagai kelompok kepentingan yang mendesakkan kepentingannya tanpa harus kehilangan jati diri sebagai gerakan dakwah Islam. Sumbangan yang diberikan Muhammadiyah bagi reformasi politik tetap berada dalam bingkai dakwah *amar ma'ruf nahi munkar*. Bahkan masih segar dengan citra yang dilekatkan padanya sebagai gerakan *tajdid* yang selalu gelisah melihat segala sesuatu yang mapan dan tak berubah (*status quo*).

Apa yang dilalui Muhammadiyah selama masa Orde Baru merupakan bagian dari potret perjalanan kekuasaan politik Indonesia khususnya kekuatan Islam dalam menghadapi pembangunan politik pemerintah Orde Baru memberi titik tekan pada penciptaan stabilitas politik dan percepatan pertumbuhan ekonomi melalui ideologi *developmentalisme*. Konsekuensinya, kekuatan-kekuatan politik potensial di bonsai demi kepentingan pembangunan.

Bulan madu antara pemerintah dengan kelompok politik Islam agaknya hanya berlangsung lebih kurang sepuluh tahun sehingga datangnya krisis multi wajah. Krisis yang menggerus basis legitimasi Orde Baru tersebut memaksa hampir seluruh kekuatan politik Islam berbalik arah menjadi oposisi yang galak bagi pemerintah. Seorang warga Muhammadiyah yang kebetulan pimpinan ormas Islam terbesar itu, Amien Rais mengambil posisi sebagai oposan bagi pemerintah Soeharto. Selama tiga tahun kepemimpinan dalam Muhammadiyah, ia melontarkan kritik bertubi-tubi atas praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pemerintah. Kekhawatiran hingga penentangan terhadap langkah yang ditempuhnya tidak menyurutkan cita-cita menegakkan *clean governance* dan demokrasi di Indonesia. Sampai akhirnya ia bergandeng tangan dengan komponen lain untuk meruntuhkan rezim yang terbukti korup.

Era Indonesia baru pasca reformasi yang relatif bebas dan terbuka tidak pernah mengubah jati diri Muhammadiyah sebagai gerakan sosial-kemasyarakatan berbasis Islam. Muhammadiyah tidak tergoda mencicipi manis pahitnya memasuki ranah-ranah politik praktis yang penuh hingar bingar perebutan kekuasaan. Dengan demikian, keterlibatan yang cukup kental dalam politik semata merupakan wujud kepeduliannya terhadap nasib umat dan bangsa.